

## Gubernur Kalsel Serahkan DIPA dan TKDD HST Tahun Anggaran 2020



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/11/27/gubernur-kalsel-serahkan-dipa-dan-tkdd-hst-tahun-anggaran-2020>

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, menyerahkan DIPA dan TKDD kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) & Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Kalsel tahun anggaran 2020 APBN.

Tema acara kebijakan Viskal APBN untuk “Akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia”, bertempat di gedung Idham Khalid Komplek Perkantoran Gubernur Kalsel, berapa hari lalu.

Bupati HST H A Chairansyah menerima secara simbolis DIPA dan TKDD untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 1 triliun 47 milyar 900 ratus 20 juta 100 ribu rupiah.

Chairansyah mengatakan setelah pihaknya menerima DIPA tahun anggaran 2020 berharap agar dapat direalisasikan secepat mungkin pada awal tahun dan berupaya semaksimal mungkin untuk segera dapat dilaksanakan sesuai tepat waktu, ujarinya

Gubernur Kalsel H.Sahbirin Noor mengatakan sesuai target yang ditetapkan dan pesan Presiden Joko Widodo agar Kementerian dan Pemerintah Daerah agar secepat mungkin merealisasikan program yang dibiayai APBN.

Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat, pesannya.

Terhadap pengguna anggaran beliau berpesan dapat dijaga secara efektif dan akuntabilitas serta melakukan perbaikan dan tata kelola keuangan sehingga perencanaan tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan hal tersebut semata mata guna mencegah menyalahgunaan anggaran.

Dikatakannya APBN mempunyai skala prioritas yaitu sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala kendala regulasi, transformasi ekonomi, penyederhanaan birokrasi.

Dia yakin kalau sudah dipahami dan didukung maka anggaran tahun 2020 akan berhasil dilaksanakan atas kerja keras dan kemauan serta keuletan baik gubernur maupun bupati/walikota sehingga hasilnya akan terlihat secara signifikan, pintanya.

Terdapat 5 program prioritas kerja dalam APBN tahun anggaran 2020 yakni, pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan Infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi. “Total alokasi anggaran yang dikelola oleh satuan kerja vertikal dan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 27,715 triliun,” kata Usdek.

Dengan jumlah alokasi sebesar Rp 27,715 triliun tersebut, Usdek berharap mampu memberi kontribusi yang optimal bagi tercapainya Tema Kebijakan Fiskal Nasional Tahun Anggaran 2020 ini. Dirinya juga menegaskan perlu dilakukan upaya maksimal oleh semua pemangku kepentingan untuk melakukan monitoring, evaluasi sekaligus mengawal secara intens penyerapan DIPA yang ada dalam kendalanya di satuan kerja dan atau wilayahnya masing-masing.

“Hal ini untuk menghindari permasalahan penyerapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak optimal akibat penyerapan anggaran selalu menumpuk di akhir tahun,” katanya

Dari paparan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, dari sisi perencanaan dan manajemen kas dirasa masih kurang baik. Khusus tahun 2019, sampai dengan tanggal 20 November 2019, anggaran yang dicairkan baru mencapai 75,5% atau Rp 7,42 triliun.

Sehingga pada 5 minggu terakhir, diprediksi akan terjadi pencairan dana APBN sebesar 1,4 triliun, dengan asumsi target pencairan adalah 90% dari alokasi pagu anggaran tahun 2019.

Usdek menuturkan untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas, diharapkan seluruh Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah yang memperoleh alokasi dana APBN agar melakukan langkah-langkah strategis sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-837/MK.05/2019 tanggal 22 November 2019.

“Seperti melakukan reuiu terhadap DIPA dalam hal diperlukan, agar segera mengajukan usulan revisi DIPA. Juga, melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat pelaksanaan program, kegiatan, proyek dan lain-lain,” tandasnya.(rico)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Gubernur Kalsel Serahkan DIPA dan TKDD HST Tahun Anggaran 2020, Senin, 30 Desember 2019.
2. <https://kalimantanpost.com>, Gubernur Kalsel Serahkan DIPA dan TKDD HST Tahun Anggaran 2020, Senin, 30 Desember 2019.

#### **Catatan:**

✿ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri empat kategori yakni:

1. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran;
2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan;
3. Kepatuhan Terhadap Regulasi;
4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.

✿ 12 Indikator Penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
2. Penyelesaian Tagihan (bobot 20%);
3. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%);
4. Data Kontrak (bobot 10%);
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) (bobot 10%);

6. Revisi DIPA (bobot 5%);
7. Pengembalian/Kesalahan SPM (bobot 5%);
8. Retur SP2D (bobot 5%);
9. Penyampaian LPJ Bendahara (bobot 5%);
10. Renkas/ RPD Harian (bobot 5%);
11. Nilai Pagu Minus Belanja Pegawai (bobot 5%);
12. Dispensasi Pengajuan SPM (bobot 5%).

(Sumber: <https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/painan/id/berita/berita-terbaru/202-berita-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara/2845-sosialisasi-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran.html>)